



**PEMERINTAH
KOTA BATAM**

RENCANA KERJA

**TAHUN
2025**

**INSPEKTORAT
DAERAH**

WELCOME TO BATAM



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **95** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

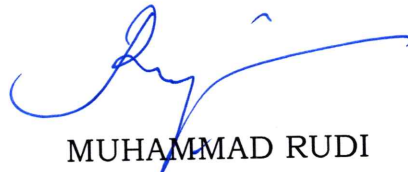
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

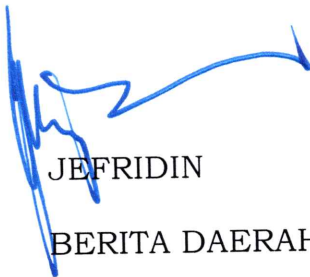
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1435

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan. Proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam dapat tercapai.

Batam, Juli 2024.
Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680824 199008 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	II-6
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.....	II-9
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-12
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.	II-15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah.....	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

Daftar Tabel:

Tabel 2.3	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023.....	II-3
Tabel 2.7	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.....	II-7
Tabel 2.9	Tabel Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Batam.....	II-9
Tabel 3.5	Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	III-5

Daftar Gambar:

Gambar 1.2	Gambar Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	I-2
Gambar 1.3	Gambar Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-3

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah bertugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai peraturan tersebut kedudukan Inspektorat Daerah adalah unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Batam dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

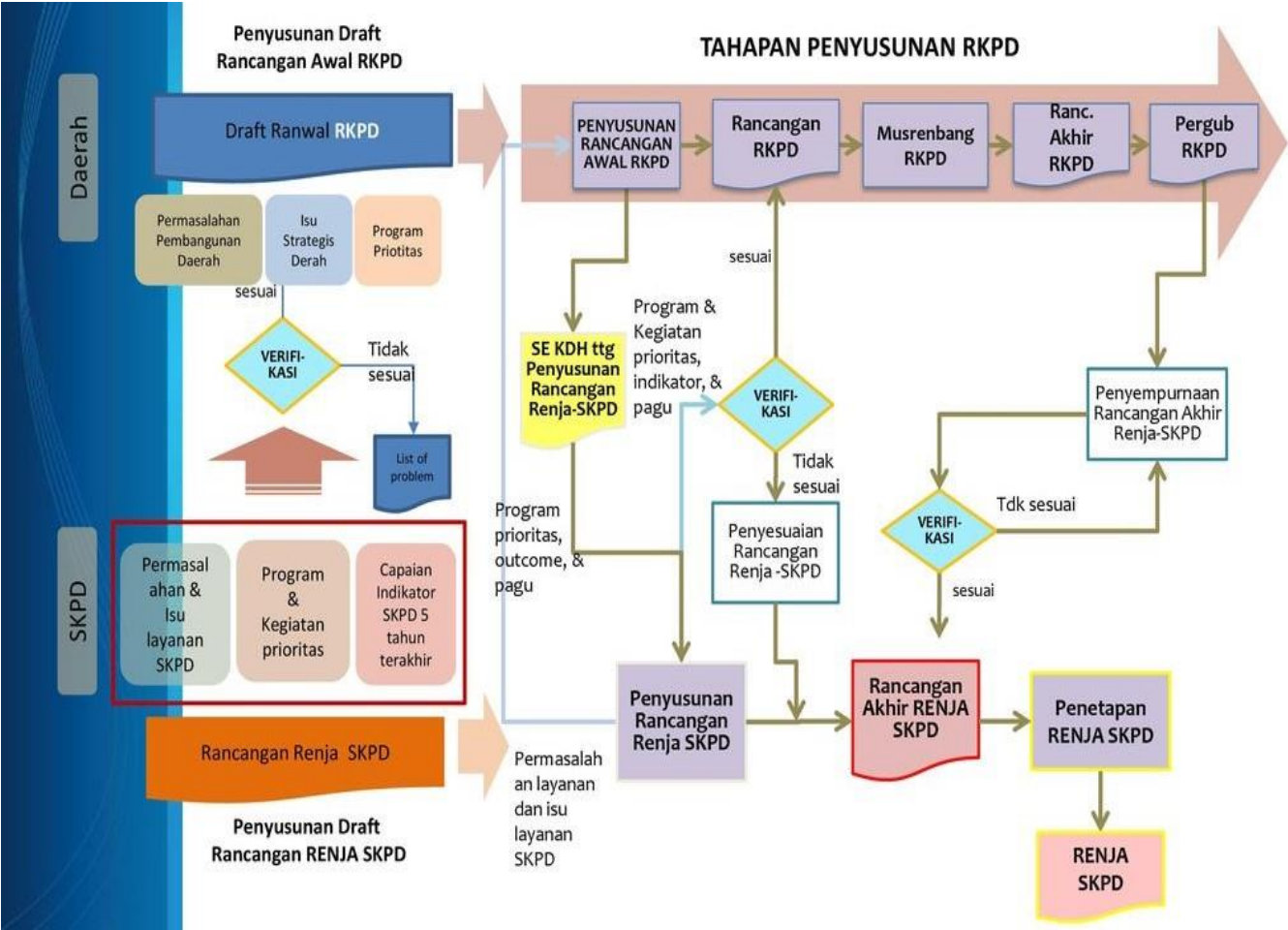
Inspektorat Daerah merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah dalam upaya mencapai sasaran strategik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

Renja Inspektorat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud

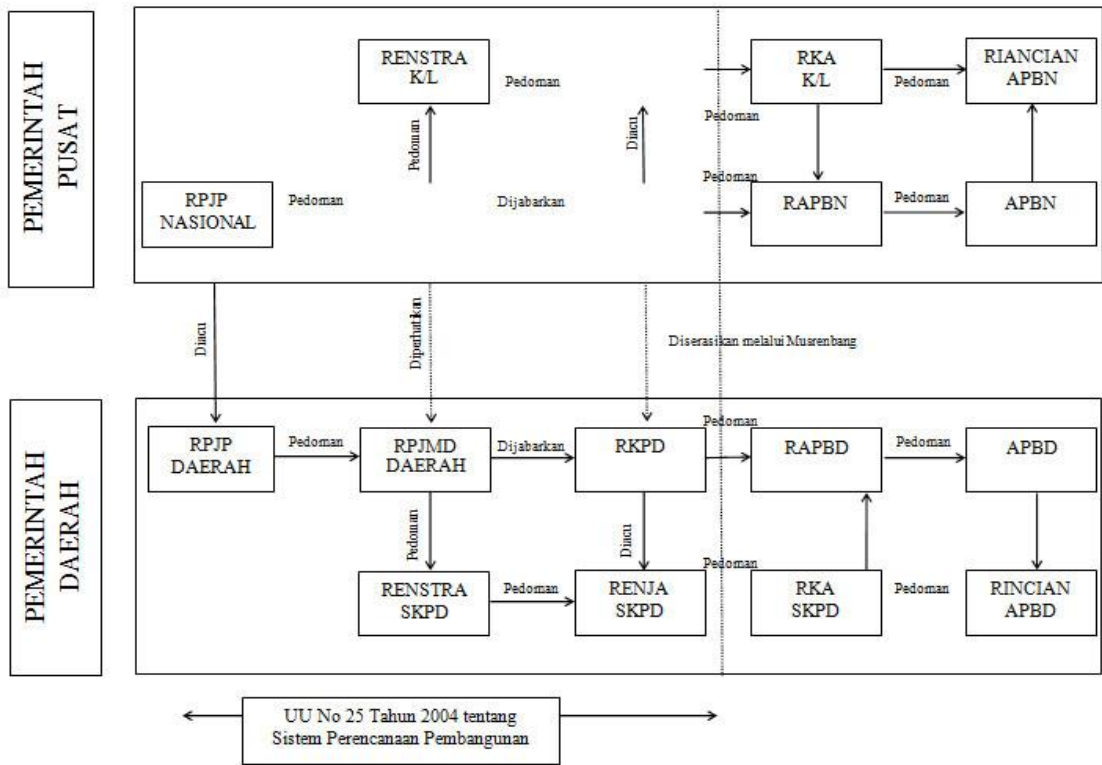
meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7. Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 121);
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 935);
12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 234 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1102);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1148);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Batam dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah di tahun 2025;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penanggaran Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala Daerah serta capaian program nasional NSPK, SPM, dan SGDs (*Sustainable Development Goals*). Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Terhadap rancangan awal RKPD membandingkan antar rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan belanja perangkat daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penjelasan tentang bagaimana proses usulan program/kegiatan para Pemangku kepentingan tersebut diperoleh dan diakomodir.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisi tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh peraturan ini.

Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2023, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah, dalam APBD Kota Batam tahun 2023 sebesar Rp27.248.548.049,00. Kemudian Perubahan APBD menjadi Rp27.816.491.059,00 Realisasi anggaran sebesar Rp26.307.900.989,00 atau 94.58%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp26.085.354.799,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp25.009.286.968,00 dengan persentase sebesar 95.87%.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp560.205.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp313.365.744,00 dengan persentase sebesar 55.94%.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp280.973.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 190.951.626,00 dengan persentase sebesar 67.96 %.
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp138.259.760,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp112.992.110,00 dengan persentase sebesar 81.72 %.

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp180.580.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp169.457.700,00 dengan persentase sebesar 93.84 %.
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp195.373.500,00 dan realisasi sebesar Rp 181.526.000,00 dengan persentase sebesar 92.91%.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp51.682.500,00 dan realisasi sebesar Rp39.082.000,00 dengan persentase sebesar 75.62%.
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
 - a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 324.062.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp291.238.750,00 atau 89.87%.

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input*, *output* dan *outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6)	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/9))
				Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
				Bidang/Urusan Pengawasan									
6.	01.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54%	54%
%				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan	79 orang/ bulan	89 orang/bulan	89 orang/bulan	100%	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28%	98%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	79 orang	89 orang	89 orang	100%	88 orang	88 orang	98%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33%	60%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	1 Paket	2 Paket	40%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	7 Paket	-	30%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	-	0 Paket	0 Paket	-	2 Paket	5 Paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	0 Paket	0 Paket	-	3 Paket	0	0%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	5 Paket	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/9))	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0 paket	0 paket	0%	5 unit	-	0%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	0 unit	0 unit	0%	149 unit	-	-
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 Laporan	50%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 Laporan	50%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 Laporan	50%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	-	45 Unit	45 Unit	100%	45 Unit	-	60%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	93%	-	87%	89%	102%	89%		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
			Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	8 laporan		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan		
		Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	-	43 Laporan	43 Laporan	100%	18 laporan		

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023
Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/ d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = (7/6))	(9)	(10 (5+7+9))	(11 = (10/9))
				Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1 Laporan	43 Laporan	100%	2 laporan		
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100%	1 Kesepakatan		
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	86%	-	70%	91%	130%	79%		
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0%
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0%
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	-	100%	100%	100%	100%		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	-	100%	100%	100%	100%		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%	1 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0%
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	-	100%	100%	100%	100%	60%	60%
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%	43 Perangkat Daerah	-	0%
				Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	0	0	0
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0%	43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Batam telah menetapkan Tujuan yaitu Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas denga Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP. Adapun indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 ada 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator yaitu:

- 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator :
 - a. Persentase SKPD dengan SAKIP Mencapai Nilai minimal BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat
 - b. Nilai Kapabilitas APIP
- 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator :
 - a. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi
 - b. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B
- 3. Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator :
 - a. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023 (n-2)	2024 (n-1)	2025 (n)	2026 (n+1)	2023	2024	2025	2026	
1. Tingkat Maturitas SPIP			Level 3 (3.1500)	Level 3 (3.2000)	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)	Level 3 (3.108)	-	Level 3 (3.2500)	Level 3 (3.3000)	
2. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dar Hasil Evaluasi Inspektorat			81%	86%	93%	100%	81%	-	93%	100%	
3. Nilai Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	
4. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			82%	83%	84%	85%	93%	-	84%	85%	
5. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.			81%	86%	93%	100%	0%	-	93%	100%	
6. Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan.			83,40	83,60	83,80	84,00	88,83%	-	83,80	84,00	
7. Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
8. Persentase rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindak lanjuti			88%	89%	90%	93%	91.78%	-	90%	93%	
9. Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Integritas			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat dengan formula perhitungannya adalah Perangkat Daerah yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah dikali 100%. Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga), yang mendapat nilai minimal BB adalah 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah. Jadi, 35 dibagi 43 dikali 100 adalah 81% (delapan puluh satu). Evaluasi dilaksanakan pada 4 (empat) komponen besar yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal. Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta terkait lainnya. Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tahun ini dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah yaitu 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang dikelompokkan menjadi 3 klaster yaitu:
- 1) Klaster Utama terdiri dari 11 Perangkat Daerah.
 - 2) Klaster Pendukung terdiri dari 12 Perangkat Daerah.
 - 3) Klaster Tambahan terdiri dari 20 Perangkat Daerah.

Capaian nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja rata-rata pada OPD dilingkungan pemerintah kota Batam termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, dimana terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik di unit kerja utama, maupun di unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

b. Nilai Kapabilitas APIP.

Target Kinerja Inspektorat tahun 2023 adalah berada pada Level 3 dan realisasi capaian kinerja adalah Level 3 sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang penilaiannya terdiri dari elemen yang saling terkait yaitu Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Hubungan Organisasi, Struktur tata Kelola, Peran dan Layanan agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Harapannya kapabilitas APIP dapat meningkat melalui perbaikan atas *Area of Improvement* dalam bentuk *Action Plan*, Inspektorat diharapkan dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan

korupsi, dan dapat memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan."

2. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2023 adalah 82.00% (Delapan puluh dua persen) dengan realisasi yaitu 93%, jika dijumlahkan antar target dan kinerja ialah 113% (seratus tiga belas). Proses capaian terhadap rencana aksi pelaksanaan pencegahan korupsi dilaksanakan melalui aplikasi KORSUPGAH KPK pada alamat *jaga.id* yang dikelola oleh Admin *Monitoring Centre of Prevention (MCP)* terhadap 8 (delapan) area intervensi yang menjadi objek penilaian tetapi pemerintah kota Batam dari 8 (delapan) area intervensi hanya memiliki 7 (tujuh) area intervensi. Intervensi yang dimaksud yaitu Pengelolaan Dana Desa.

Adapun capaian 8 area dimaksud adalah APBD Pemko Batam sebesar 100.00, Pengadaan Barang dan Jasa 87.31, Perizinan 87.00, Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 97.76, Manajemen ASN 87.66, Optimalisasi Pajak Daerah 91.71 dan Barang Milik Daerah 93.38. Pada Februari Tahun 2024 pemerintah kota Batam mencapai progress 92,15% (Sembilan Puluh Dua koma Lima Belas persen). Penilaian capaian secara menyeluruh untuk MCP KPK tahun 2023 akan dilaksanakan pada Maret tahun 2024.

- b. Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B dengan formula perhitungannya adalah PD yang mendapat nilai minimal BB dibagi dengan jumlah PD dikali 100%. Jumlah Perangkat Daerah yang direncanakan untuk dievaluasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah, namun dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran tersebut tidak bisa dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam PermenpanRB Nomor 3 tahun 2023 tentang perubahan atas permenpan nomor 25 tahun 2020 tentang RoadMap RB 2020 – 2024 dan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan mencabut peraturan sebelumnya mengakibatkan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja penilaian mandiri RB yaitu :

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks
- 2) Terdapat redudansi atau duplikasi antara komponen indikator indeks
- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks kepada masing-masing K/L/D menggunakan self-assesment (Penilaian Mandiri) dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan
- 5) Metode Penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar

Maka fokus pelaksanaan RB 2020 – 2024 yang mengarahkan pelaksanaan RB kedalam dua fokus yaitu RB General yang fokus penyelesaian isu hulu, serta RB

Tematik yang fokus penyelesaian isu hilir.

Bahwa dalam tahapan Pembangunan RB General maupun RB Tematik berdasarkan Peraturan MenpanRB No 3 tahun 2023, tahapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB di internal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat/APIP Pemerintah Daerah selaku Evaluator Internal. Berdasarkan Peraturan MenpanRB no 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, ruang lingkup Evaluasi Internal adalah Evaluasi Tahap Perencanaan (*ex-ante*) dan Evaluasi tahap pelaksanaan (*on going*). Adapun monitoring dan evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam untuk triwulan III dan triwulan IV dimana keluaran atau output dari Evaluasi Internal tersebut adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan tim RB Kota Batam agar kualitas RB mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan Kinerja Organisasi pada Pemerintah Kota Batam.

3. Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator:

- a. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan, untuk mencapai target yang akan dicapai, maka dilakukan penilaian dengan cara survei secara elektronik (*e-survey*) terhadap beberapa responden atas pelayanan yang diberikan oleh bagian sekretariat dilingkungan Inspektorat Daerah. Survei ini telah diikuti oleh 80 (delapan puluh) responden yang kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat (IKLS). Dari hasil pengolahan data, diperoleh IKLS 88,83 yang menunjukkan mutu pelayanan kesekretariatan Inspektorat Daerah Kota Batam termasuk dalam kategori 'SANGAT BAIK'.

Adapun target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 adalah 83.40% (delapan puluh dua koma empat puluh persen). Penghitungan hasil yang telah dicapai adalah 88,83% dibagi 83,40% dikali 100% sehingga didapat hasil 107% (Seratus Tujuh Persen).

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Batam masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi seperti yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kuantitas APIP baik dalam jabatan fungsional tertentu maupun fungsional umum;
- b. Masih kurangnya pemahaman Satuan tugas SPIP perangkat daerah dalam penerapan SPIP terintegrasi;
- c. Penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah belum berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis terhadap visi misi Wali Kota Batam , Renstra Kementerian, serta dengan memperhatikan tuntutan masyarakat, khususnya di

wilayah Kota Batam yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindak lanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kota Batam, maka perlu dilakukan pemetaan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kota Batam. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Inspektorat Daerah Kota Batam adalah sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas APIP agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan akan lebih optimal dan profesional;
- b. Optimalisasi penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah.
- c. Optimalisasi penerapan SPIP terintegrasi pada perangkat daerah.
- d. Belum terbangunnya Zona Integritas

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batam. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi;
- 2) Adanya forum komunikasi/koordinasi pengawasan baik tingkat provinsi maupun nasional;
- 3) Perkembangan teknologi sistem Informasi;
- 4) Adanya kebijakan perencanaan pengawasan dari Kemendagri setiap tahunnya sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

b. Kelemahan

- 1) Perencanaan pengawasan berbasis risiko yang belum optimal;
- 2) Kondisi sarana, prasarana dan gedung kantor yang kurang memadai sehingga belum mendukung kinerja secara optimal;
- 3) Terbatasnya kompetensi dan kuantitas SDM APIP.

c. Peluang

- 1) Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam kegiatan Pendampingan;
- 2) Kemitraan dengan BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Batam;
- 3) Amanat dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1/8737/SJ Tanggal 9 Desember 2022 Tentang Penguatan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah;
- 4) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN.

d. Tantangan

- 1) Terbentuknya Sinergitas dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan;
- 2) Tuntutan penguatan peran Inspektorat Daerah dalam memberikan konsultasi, asistensi dan pendampingan;
- 3) Perubahan peraturan perundangan bidang pengawasan yang harus disikapi secara cepat dan tepat.
- 4) Perencanaan diklat dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sesuai kebutuhan.
- 5) Pelayanan inspektorat membutuhkan ruangan yang representatif untuk mendukung kinerja pelayanan yang optimal.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Batam

OPD: Inspektorat Daerah

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT DAERAH				45.267.716.950.00					42.777.768.673	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	41.695.181.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	40.573.831.073	
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	33.950.000.000	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.745.994.473	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	33.950.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	33.745.994.473	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.421.500.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	2.597.136.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	71.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	95.392.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 orang	2.350.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	2.501.744.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.692.040.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.613.484.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.810.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300.770.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	120.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	128.230.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.634.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.010.040.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.094.790.000	
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	3.202.580.000	Kegiatan Pengadnan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	2.185.815.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	504.650.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.270.503.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	500.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	443.947.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	156 Unit	2.197.930.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	471.365.00	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	64.061.600	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	62.061.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.061.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.061.600	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	365.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	369.340.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau endaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau endaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.040.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	320.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	245.320.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	95 Unit	65.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	118 Unit	79.980.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	91%	1.148.041.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	90%	825.748.200	
7	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%	811.570.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	100%		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	38.630.000	
			Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP		Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100%		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	250.000.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8 Laporan	111.800.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Laporan	85.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	43.490.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	25 Laporan	46.570.000	Reviu Laporan Kinerja	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	28.521.200	
	Reviu Laporan Keuangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	30.000.000	Reviu Laporan Keuangan	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	43.865.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	400.000.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Kota Batam	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	358.764.000	
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	83%	336.471.200	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	84%	200.678.000	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	2 Laporan	170.000.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	1 Laporan	15.970.000	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	166.471.200	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Batam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	184.708.000	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	2.424.494.150	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	100%	1.378.189.400	
9	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	379.494.150	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100%	17.646.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	180.853.050	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	9.946.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	198.641.100	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kota Batam	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 rekomendasi	7.700.000	
10	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	2.045.000.000	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100%	1.360.543.000	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	295.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	256.351.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	170.000.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	97.572.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	1.350.000.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Batam	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	782.827.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	230.000.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Batam	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	223.793.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 dengan kesepakatan hasil musrenbang Tahun 2024. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			nihil		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembinaan dan Pengawasan secara nasional tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian pembinaan penyelenggaran pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

- a. Provinsi, dilaksanakan oleh:
 - 1. Menteri, untuk pembinaan umum.
 - 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis.
- b. Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pembagian urusan pemerintahan;
- b. Kelembagaan daerah;
- c. Kepegawaian pada perangkat daerah;
- d. Keuangan daerah;
- e. Pembangunan daerah;
- f. Pelayanan publik di daerah;
- g. Kerja sama daerah;
- h. Kebijakan daerah;
- i. Kepala daerah dan DPRD;
- j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.

Pengawasan teknis meliputi:

- a. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
- b. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, operasi, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren.

Selain melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Menteri dan Menteri teknis/kepala Lembaga non kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengawasan yang menjadi tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam melakukan pengawasan, Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri teknis dan kepala pemerintahan non kementerian dalam melakukan pengawasan teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Menteri. Dalam pengawasan umum terdapat keterkaitan dengan kewenangan pengawasan teknis, Menteri mengadakan koordinasi dengan Menteri teknis/kepala Lembaga pemerintahan non kementerian. Koordinasi dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengawasan umum dan teknis dilakukan dalam bentuk reuviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsian dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Independen;
- c. Objektif;

- d. Tidak tumpang tindih antar APIP; dan
- e. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan APIP dilakukan pada tahap kegiatan:

- a. Penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan Visi dan Misi. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran dapat menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja dimasing-masing tujuan. Untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Dalam mencapai tujuan Inspektorat Daerah, perlu dilakukan asistensi dan pendampingan penerapan SPIP terintegrasi pada perangkat daerah.

SASARAN :

Sasaran 1 Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dengan indikator :

- a. Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian.

Sasaran 2 Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:

- a. Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai minimal BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
- b. Nilai Kapabilitas APIP.

Sasaran 3 Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indikator:

- a. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana diuraikan diatas dan dengan memperhatikan isu-isu strategis, maka prioritas kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan.
2. Melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam penerapan SPIP terintegrasi pada perangkat daerah.
3. Melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah.
4. Melaksanakan evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah.
5. Melaksanakan pendampingan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah.
6. Meningkatkan kapabilitas APIP.
7. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan;
8. Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
9. Mengoptimalkan manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
10. Mengoptimalkan sistem deteksi dini (*early warning*) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi *fraud*, maupun penyimpangan lainnya; dan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Batam yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam dalam satu tahun mendatang.

Pada Tahun anggaran 2025, Inspektorat sudah merumuskan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan sesuai dengan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 dengan anggaran sebesar Rp.42.777.768.673 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh

juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Adapun program tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran 3 yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang sasaran 1 yaitu :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian sasaran 2 yaitu :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
- b. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan

Rumusan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Bata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	INSPEKTORAT				42.777.768.673				47.662.877.798
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah		100%	40.573.831.073			100%	43.848.715.680
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Batam	100%	33.745.994.473	APBD		100%	35.647.500.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		88 Orang/bulan	33.745.994.473			88 Orang/bulan	35.647.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Batam	100%	2.597.136.000	APBD		100%	2.542.575.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	95.392.000			2 Paket	75.075.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		88 Orang	2.501.744.000			88 Orang	2.467.500.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Batam	100%	1.613.484.000	APBD		100%	1.776.642.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	14.810.000			1 Paket	42.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	300.770.000			5 Paket	420.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	128.230.000			4 Paket	126.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	54.634.000			3 Paket	84.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	20.250.000			1 Paket	44.100.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1.094.790.000			12 Laporan	1.060.542.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Batam	100%	2.185.815.000	APBD		100%	3.362.709.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit	1.270.503.000			3 Unit	529.882.500
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit	443.947.000			1 Paket	525.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		149 Unit	471.365.000			34 Unit	2.307.826.500
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	100%	62.061.600	APBD		100%	67.264.680
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	26.061.600			12 Laporan	27.364.680
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	36.000.000			12 Laporan	39.900.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Batam	100%	369.340.000	APBD		100%	452.025.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 Unit	44.040.000			1 Unit	47.250.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	245.320.000			8 Unit	336.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		118 Unit	79.980.000			118 Unit	68.775.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti		90 %	825.748.200			90 %	1.268.443.260
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal 2.Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	Batam	100%	625.070.200	APBD		100%	915.148.500
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		11 Laporan	111.800.000			30 Laporan	262.500.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		15 Laporan	43.490.000			1 Laporan	89.250.000
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		19 Laporan	28.521.200			25 Laporan	48.898.500
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		1 Laporan	43.865.000			1 Laporan	31.500.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1 Kesepakatan	358.764.000			1 Kesepakatan	420.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		2 Dokumen	38.630.000			2 Dokumen	63.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	Batam	84 %	200.678.000	APBD		89 %	353.294.760
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1 Laporan	15.970.000			1 Laporan	178.500.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		2 Laporan	184.708.000			2 Laporan	174.794.760
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas		100%	1.378.189.400			100%	2.545.718.858
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan		100%	17.646.400	APBD		100%	398.468.858
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	9.946.400			1 Rekomendasi	189.895.703
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1 Rekomendasi	7.700.0000			1 Rekomendasi	208.573.155
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	Batam	100 %	1.3660.543.000	APBD		100 %	2.147.250.000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		43 Perangkat Daerah	256.351.000			43 Perangkat Daerah	309.750.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		43 Perangkat Daerah	97.572.000			43 Perangkat Daerah	178.500.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		2 kegiatan	782.827.000			2 kegiatan	1.417.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		43 Perangkat Daerah	223.793.000			43 Perangkat Daerah	241.500.000
TOTAL :					42.777.768.673				47.662.877.798

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2025 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
						INSPEKTORAT DAERAH			42.777.768.673				47.662.877.798
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			42.777.768.673				47.662.877.798
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			42.777.768.673				47.662.877.798
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100 %	40.573.831.073			100 %	43.848.715.680
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	33.745.994.473			-	35.647.500.000
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	33.745.994.473	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		35.647.500.000
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	2.597.136.000			-	2.542.575.000
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.392.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.075.000
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	2.501.744.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.467.500.000
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.613.484.000			-	1.776.642.000
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.810.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42.000.000
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	300.770.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.000.000
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	128.230.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		126.000.000
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.634.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		84.000.000
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.250.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		44.100.000
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.094.790.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.060.542.000

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100 %	2.185.815.000			-	3.362.709.000
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.270.503.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		529.882.500
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	443.947.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		525.000.000
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	471.365.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.307.826.500
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	62.061.600			-	67.264.680
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.061.600	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.364.680
	6	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		39.900.000
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	369.340.000			-	452.025.000
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.040.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		47.250.000
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	245.320.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		336.000.000
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	79.980.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		68.775.000
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	90 %	825.748.200			90 %	1.268.443.260
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1. Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal 2. Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP	100 % 100 %	625.070.200			-	915.148.500
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	11 Laporan	111.800.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		262.500.000
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	43.490.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		89.250.000
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	28.521.200	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.898.500
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	43.865.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		31.500.000
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal							
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	358.764.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.000.000
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	38.630.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63.000.000
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah	84 %	200.678.000			-	353.294.760
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	15.970.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		178.500.000
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan	184.708.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		174.794.760
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas.	100 %	1.378.189.400			100 %	2.545.718.858
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase rekomendasi kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	100 %	17.646.400			-	398.468.858
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	9.946.400	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		189.895.703
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	7.700.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		208.573.155
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi	100 %	1.360.543.000			-	2.147.250.000
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 perangkat daerah	256.351.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		309.750.000
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 perangkat daerah	97.572.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		178.500.000
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	782.827.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.417.500.000
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16 perangkat daerah	223.793.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		241.500.000
	J U M L A H								42.777.768.673,00				47.662.877.798,00

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera” maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja 2025 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra, Renja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI